

**PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE (GG) DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

LUSI FITRIA

2006/77757

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**

Nama : LUSI FITRIA
NIM/BP : 77757/2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

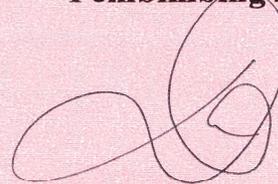
Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

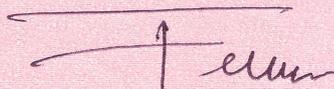
Pembimbing 2



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

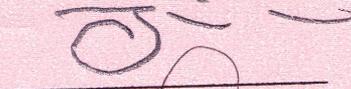
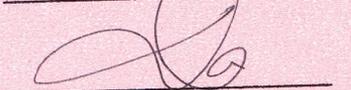
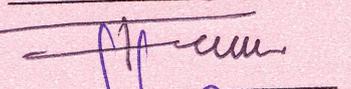
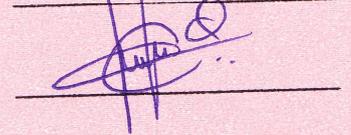
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)

Nama : Lusi Fitria
BP/NIM : 2006/77757
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr.H.Efrizal Sofyan, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	Deviani, SE, M.Si, Ak	
3.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
4.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusi Fitria
NIM/ Tahun Masuk : 77757/2006
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok / 28 April 1988
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance (GG)* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) Saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2011

Yang menyatakan,



Lusi Fitria
NIM.77757

ABSTRAK

Lusi Fitria (2006/77757) Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2011

Pembimbing I : Dr.H. Efrizal Sofyan, SE, M.si, Ak

Pembimbing II : Deviani, SE, MSi, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pelaksanaan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2) Pengaruh Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *sampling jenuh*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,627 > 1,7171$ ($\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima. 2) Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,099 > 1,7171$ ($\text{sig } 0,005 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Teristimewa buat kedua orang tuaku Drs, Mahadi S, Nuryasmi BA, dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Laporan Keuangan	8
a. Pengertian Laporan Keuangan	8

b.	Tujuan Laporan Keuangan	9
c.	Komponen Laporan Keuangan	12
d.	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	12
e.	Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	15
2.	<i>Good Governance</i>	18
a.	Pengertian <i>Good Governance</i>	18
b.	Karakteristik <i>Good Governance</i>	20
3.	Standar Akuntansi Pemerintahan.....	26
a.	Standar Akuntansi	26
b.	Standar Akuntansi Pemerintahan	26
c.	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	28
d.	Unsur Laporan Keuangan	30
B.	Penelitian Relevan	34
C.	Kerangka Konseptual	35
D.	Hipotesis	37
BAB III.	METODE PENELITIAN	38
A.	Jenis Penelitian	38
B.	Populasi Dan Sampel	38
C.	Jenis data dan Sumber data.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
E.	Variabel Penelitian.....	40
F.	Instrumen Penelitian	41
G.	Uji Validitas dan Reliabilitas	43
H.	Hasil Uji Coba Instrumen.....	44

I. Uji Asumsi Klasik	45
J. Teknik Analisis Data	47
K. Definisi Operasional	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Demografi Responden	54
C. Statistik Deskriptif	57
D. Uji Valid dan Reliabilitas	58
E. Uji Asumsi Klasik	59
F. Deskriptif Variabel Penelitian	62
G. Hasil Penelitian	68
H. Pembahasan	72
BAB V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Keterbatasan	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar nama SKPD	39
2. Skala Pengukuran	41
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	42
4. Uji <i>Pilot-Test</i> Instrumen Penelitian	45
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	53
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	55
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian Yang telah Ditempuh	55
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja	56
10. Statistik Deskriptif	57
11. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Penelitian.....	58
12. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	59
13. Uji Normalitas	60
14. Uji Multikolinearitas	61
15. Uji Heterokedastisitas	62
16. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemda.....	63
17. Distribusi Frekuensi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan.....	64
18. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	66
19. Uji Koefisien Determinasi	68
20. Koefisien Regresi Berganda.....	69
21. Uji F Hitung	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
22. Kerangka Konseptual	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penelitian Responden.....	80
2. Kuesioner Penelitian	81
3. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	86
4. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	91
5. Statistik Deskriptif	95
6. Uji Asumsi Klasik	95
7. Uji Regresi Berganda	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Pemenuhan tujuan laporan keuangan akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami .

Relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Keandalan

mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur. Dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode. Yang terakhir, dapat dipahami yaitu di mana informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Tiga hal untuk pencapaian penyusunan kualitas laporan keuangan yang baik, yakni SDM (*human factor*), lembaga (*institutions*) dan budaya (*cultures*). (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Sumber Daya Manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi syarat kualitatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan akan berkualitas bila Sumber Daya Manusia membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siska (2009), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Resti (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Lembaga pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali. Dengan diterapkan *Good Governance* yang baik maka kinerja di instansi tersebut akan baik pula.

Organisasi pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ratih (2009), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penerapan *good governance* (GG) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (modul *good governance*, 2006).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk laporan keuangan kota Bukittinggi adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam LKPD Bukittinggi tersebut BPK menemukan ketidakjelasan penggunaan dana pada Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp. 3,6 miliar dan penyertaan modal Pemko Bukittinggi ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1,8 miliar. Selain itu, hasil temuan BPK lainnya terkait LKPD Bukittinggi yang diduga merugikan keuangan Negara yaitu penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 162 juta, Sekretariat

DPRD sebesar Rp. 70 juta dan sejumlah asset Pemko Bukittinggi tidak memiliki sertifikat. (*sumber indowarta 22 juli 2010*).

Tahun 2008 sampai 2009 laporan keuangan Kota Bukittinggi juga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya Kota Bukittinggi belum naik kelas dari tahun 2008, 2009 dan 2010, adapun penyebab utama Kota Bukittinggi belum memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah masalah pengelolaan aset. Ada beberapa SKPD yang asetnya kurang diyakini auditor, adanya ketidakcocokan laporan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, setiap pimpinan SKPD harusnya tepat waktu dalam memberikan laporan keuangan disertai dengan laporan aset.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah karena adanya ketidakjelasan penggunaan dana yang dapat merugikan keuangan Negara. Belum dilaksanakan secara penuh pelaksanaan *Good Governance (GG)* dan Standar Akuntansi Pemerintahannya. Tetapi dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan di seluruh SKPD yang ada di kota Bukittinggi hasil TCR ternyata baik, hal ini disebabkan karena adanya perombakan atau penggantian karyawan dan kepala juga pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan di SKPD. Jadi bisa saja karyawan yang baru lebih memahami dan mengetahui cara penyajian laporan keuangan pemerintah yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penelitian yang dilakukan oleh Siska (2009)

menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan, sedangkan hasil penelitian Resti (2011) menyatakan Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lagi apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* (GG) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Sejauhmana penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi apakah sudah berstandar pada Peraturan Pemerintah yang berlaku?
2. Sejauhmana penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi?
3. Sejauhmana pelaksanaan *Good Governance* (GG) pada Pemerintah Kota Bukittinggi?

4. Sejauhmana pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?
5. Sejauhmana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berstandar pada SAP?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang dapat diteliti oleh peneliti namun karena pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan *Good Governance* (GG) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan *Good Governance* (GG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?
2. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pelaksanaan *Good Governance* (GG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pengaruh pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang Sektor Publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademik.
3. Bagi para praktisi, dengan penelitian ini maka diharapkan satuan kerja bisa mengetahui kualitas laporan dipengaruhi oleh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan diterapkannya *Good Governance* yang baik dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Indra (2006) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Syofyan (2007), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,2010) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan

secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

e. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sumber Daya Manusia. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan Sumber Daya Manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas tidak dapat dicapai apabila Sumber Daya Manusia yang berkecimpung didalamnya tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka semuanya harus dimulai dari asumsi bahwa pelaporan yang baik terwujud dari Sumber Daya Manusia yang baik. Sumber Daya

Manusia baik yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia yang mampu menjaga kapabilitas dirinya dalam setiap pembuatan laporan. Kapabilitas tersebut diantaranya adalah disiplin, kejujuran, kelihaihan melihat faktor-faktor yang akan menyebabkan kerancuan atau kesalahan pemahaman dalam pembuatan laporan. Pemasukan data yang tidak benar demi menjaga keseimbangan laporan harus dihindari oleh seorang pembuat laporan keuangan. Sumber Daya Manusia harus menyadari peran pentingnya dalam memajukan instansinya dengan ikut berperan serta membuat laporan yang sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

2. Lembaga

Hal ini berkaitan erat dengan penjagaan citra dan kualitas instansi/lembaga dimana pembuat laporan keuangan bernaung. Laporan keuangan yang benar akan menjadi acuan bagi instansi lain atau pemimpin instansi dalam membuat program atau keputusan, terutama yang berhubungan dengan anggaran. Kesalahan yang dibuat oleh sebuah lembaga dalam menyusun laporan, misalnya kesalahan data angka atau kerancuan pemahaman akan berakibat fatal terhadap jalannya program instansi. Kemungkinan terburuk seperti kekurangan dana bisa terjadi jika pemimpin atau pelaksana program mengacu pada laporan keuangan yang salah. Akibatnya tujuan, visi dan misi program tidak tercapai. Hal ini tentu akan mempengaruhi citra lembaga/instansi yang bersangkutan.

3. Budaya

Kinerja dari satu periode ke periode berikutnya juga akan mempengaruhi laporan keuangan. Upaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang baik tetap harus diperhatikan. Hal ini bisa dilakukan dengan selalu membudayakan sikap-sikap dan kebiasaan yang mengacu pada disiplin ilmu keuangan yang ada. Jika suasana ini diterapkan, para calon penerus pembuat laporan akan mempelajari hal-hal dasar dalam bekerja sehingga ia bisa menggunakannya dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya. Dengan demikian terjadi estafet kualitas laporan keuangan yang baik yang otomatis berdampak pada pandangan pihak diluar instansi keuangan tersebut.

2. *Good Governance*

Secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tetapi meskipun istilah *good governance* sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka diperlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Dharma (2004) menyatakan:

”*governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum”.

Dalam Mardiasmo (2002) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *UNDP* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan

peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.

Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku dan budaya kerjanya. Wiranto (2000) (dalam Rudi 2009)

Sementara itu *World Bank* Dalam Mardiasmo (2002) memberikan definisi *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah:

”sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik di sini maksudnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan karakteristik dasar *good governance*.

b. Karakteristik *Good Governance*

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *good governance* diawali oleh tawaran badan-badan internasional, namun cita *good governance* pada saat ini sudah menjadi bagian serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan.

Menurut Dharma (2004) “*governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance*, yaitu: (1) Bentuk rezim politik, (2) Proses di mana otorisasi digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu: (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme, akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).

Menurut *UNDP* dalam Mardiasmo (2002) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

- a. Supermasi hukum: di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
- c. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.
- d. Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.

- e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- b. Adanya perbaikan yang berkelanjutan.
- c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.

- e. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
- f. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
- g. Prospek memperoleh standar ISO pelayanan

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, karena dalam setiap penyajian laporan keuangan harus ada yang menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum suatu lembaga kepada pihak yang memiliki hak untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban laporan keuangan.

9. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

UNDP menjelaskan tata pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan semua.
2. Transparan dan bertanggungjawab.
3. Efektif dan adil pada masyarakat.
4. Menjamin adanya suplemasi hukum.
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada *consensus* masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Asian Development Bank (ADB) melalui Loina menegaskan konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi, namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, salah satunya yaitu akuntabilitas yang dalam hal ini menyangkut untuk kepentingan publik.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik semakin

terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis, maka laporan keuangan yang dibuat akan berkualitas.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktiknya yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya.

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari sebelas pernyataan standar:

1. PSAP No 01 tentang Penyajian laporan keuangan
2. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

5. PASP No 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan
11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

c. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan

setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

e. Prinsip Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran :

a. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang terdapat dalam Neraca:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

5. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

6. Laporan Operasional

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang terdapat dalam Laporan Arus Kas:

a. Penerimaan kas

Semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

b. Pengeluaran kas

Semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

8. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

9. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau Rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro.

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Ratih (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Populasi atau responden yang digunakan yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan.

Resti (2011) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Populasi atau responden yang digunakan yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bukittinggi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Siska (2009), menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi atau responden yang digunakan yaitu para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

C. Kerangka Konseptual

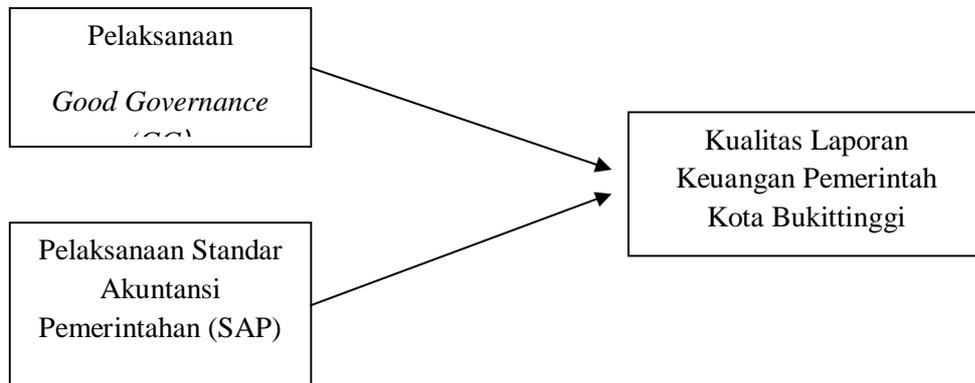
Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti pelaksanaan *Good Governance* (GG) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Salah satu prinsip dasar *good governance* yang mendukung kualitas laporan keuangan yaitu akuntabilitas dan aturan hukum (undang-undang). Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban

pelaporan keuangan. Sedangkan dalam aturan hukum, juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur dengan jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang kualitas laporan keuangan. Jika dikaitkan pelaksanaan *good governance* dengan kualitas laporan keuangan, maka semakin baik pelaksanaan *good governance* dalam suatu entitas pelaporan akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Jadi apabila pelaksanaan *good governance* tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat sendiri. Didukung penelitian, yang menyatakan *good governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Jika dikaitkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas laporan keuangan, maka semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam suatu entitas pelaporan akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Didukung penelitian, yang menyatakan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pelaksanaan *Good Governance* (GG) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi
- H₂ : Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana Pelaksanaan *Good Governance* dan dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 58,2%. Sedangkan 41,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
3. Kelemahan dari penelitian ini yaitu sampel penelitian yang di olah hanya 25 SKPD, kalau bisa sampel yang digunakan minimal 30 sampel.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan Pelaksanaan *Good Governance* dan dan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena dari hasil penelitian ini dan wawancara singkat pada beberapa responden diketahui bahwa belum terdapat pelatihan khusus untuk sistem akuntansi pemerintahan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada Pelaksanaan *Good Governance* dan dan Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.